

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2022 di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2022 di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik. Namun jika dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, sudah memiliki standar dan sasaran yang jelas serta implementor sudah memahami maksud dan tujuan dari kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti dan dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran. Tetapi dengan catatan sosialisasi program ke masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Serta dari segi sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah sudah memadai dan mampu menjalankan kegiatan dengan baik, namun masih perlu penambahan untuk sumber daya manusia pada staff teknis di PPK PKP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera agar lebih maksimal dalam menjalankan program. Sedangkan dari segi struktur birokrasi yang dimiliki BPPW dan BKAD, struktur birokrasi yang dimiliki memiliki rentang kendali yang pendek dan tidak

kompleks serta memiliki SOP yang jelas. Namun jika melihat secara umum atau keseluruhannya struktur organisasi dalam kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah ini memiliki rentang kendali yang panjang dan kompleks karena langsung dari pusat sampai ke nagari terlebih lagi implementor utama program berada di provinsi. Hal ini memberi dampak negatif terhadap lancarnya komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana. Walaupun dalam aspek komunikasi dan koordinasi dalam program ini cukup panjang dan rumit, namun dengan adanya tenaga pendukung seperti tenaga ahli dan fasilitator yang menjadi perpanjangan provinsi dengan kabupaten, kecamatan, hingga ke nagari sehingga komunikasi dan koordinasinya juga berjalan lancar. Kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti juga dikarenakan adanya dukungan Camat Kecamatan Lembah Gumanti dan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah ini masih terdapat beberapa kendala yaitu sulitnya pembebasan lahan dan konflik di masyarakat sehingga untuk di beberapa lokasi tidak terlaksana dengan baik. Serta kendala lainnya adalah besarnya pengaruh politik membuat program ini tidak menyebar secara merata, karena dalam pengusulan lokasi melalui aspirasi anggota dewan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, peneliti menyarankan beberapa hal terkait pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi

Sumatera Barat dan implementor Program PISEW di Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Pemerintah desa/nagari seharusnya memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dan mendukung program-program pemerintah karena peran masyarakat sangat penting dalam mendukung program pemerintah. Perlu adanya tata kelola anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan RAB yaitu dengan cara pendampingan desa harus lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
2. Guna meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan lagi peran dan fungsi dari fasilitator masyarakat pada program PISEW untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk kelompok masyarakat sasaran, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, sampai tahap pelestarian program. Selain itu masyarakat hendaknya dilibatkan dalam keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monev dan penerimaan manfaat. Pemerintah daerah hendaknya segera melakukan pendataan secara jelas dan terukur tentang kriteria kemiskinan, sehingga setiap kebijakan program penanggulangan kemiskinan mempunyai sasaran dan target yang tepat.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan hendaknya lebih ditingkatkan dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek atau

penerima bantuan sebagai warga miskin, namun menjadi subjek dan bahkan sebagai pelaku pembangunan.

4. Bagi pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Solok yang menerima bantuan program PISEW agar menindaklanjuti Program ini dengan cara memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, khususnya dilokasi Program PISEW tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Komunikasi dan koordinasi antar implementor lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan program semakin berjalan dengan baik.
6. Untuk Kementerian PUPR agar memperbaiki sistem pengusulan lokasi Program PISEW, yang mana tidak hanya melalui aspirasi dari anggota dewan saja, namun juga dari semua pemerintah daerah, sehingga penyebaran program lebih merata dan adil.

